

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif artinya perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relative mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan

akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Simatupang dan Saktyanu (2003)

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan atau ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, tempat berlindung dan air minum. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi kemiskinan itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) kemiskinan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dan diberantas setiap negara. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan suatu negara akan berdampak pula terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat. Begitu pula di Jawa Timur. Masalah kemiskinan telah mendapat perhatian serius melalui digalakkannya berbagai program pengentasan kemiskinan. Perkembangan pembangunan suatu daerah dapat dipantau dari indikator makro pembangunan diantaranya kemiskinan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di Jawa Timur cenderung menurun.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan masalah yang ada di pemerintahan pusat, yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain Jawa Timur pada tahun 2011 masih menduduki no 2 di antara 6 provinsi, lihat Tabel 1.1. Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan, upaya peningkatan kesejahteraan

penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Enam Propinsi di Pulau Jawa Bulan September Tahun 2011

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Kota+Desa (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	DKI	355,20	3,64
2	Banten	690,87	6,26
3	Jawa Barat	4.650,81	10,57
4	Jawa Timur	5.227,31	13,85
5	DIY	564,23	16,14
6	Jawa Tengah	5.255,99	16,21

Sumber :Badan Pusat Statistik Jatim 2012

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun sedikit menjadi 9,09 persen pada

September 2011. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,59 persen pada September 2011.

Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Adapun program pusat antara lain PNPM Perkotaan maupun perdesaan, Program Keluarga Harapan, Perbantuan Pemodalan. Sementara itu program pengentasan kemiskinan yang bersifat kedaerahan misalnya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra). Disamping itu juga berbagai inovasi yang dilakukan daerah otonom untuk mengentaskan kemiskinan misalkan pembangunan jalan poros desa (misalnya kabupaten Tuban dan Lumajang), optimalisasi dan fokusitas dana CSR (Kab. Jombang)

Penduduk miskin tersebar di perkotaan dan perdesaan di Jawa Timur. Untuk penduduk miskin yang tinggal di perkotaan mencapai 14,23persen dari total penduduk miskin atau sebanyak 5.356,21.ribu jiwa. Pengurangan penduduk miskin di daerah perdesaan lebih cepat dari perkotaan, akan tetapi tidak berbeda secara nyata (perdesaan sebesar -1,55 poin persen dan perkotaan -0,71 poin persen, lihat Tabel 1.2

Tabel 1.2
Batas Miskin, Persentase, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2007
- 2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (kota+desa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
2007	8.132.44	19,98	152.081	-1,11
2008	7.019,95	18,51	169.112	-1,47
2009	6.022,59	16,68	188.317	-1,83
2010	5.529,30	15,26	199.327	-1,42
2011	5.356,21	14,23	219.727	-1,03

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka tahun 2012

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal.

Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah diliuncurkan, akan tetapi efektivitas dari beberapa program-program penaggulangan kemiskinan masih belum menyentuh akar permasalahan terutama bantuan yang bersifat langsung

tunai. Masyarakat dan keluarga yang tadinya miskin, setelah program penanggulangan kemiskinan tersebut selesai, tetap saja menjadi keluarga miskin. Apalagi keluarga - keluarga yang mempunyai tanggungan hidupnya (anaknya) terlalu banyak sedangkan penghasilannya tidak mencukupi, ditambah lagi dengan keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin lagi, maka akan tumbuh dan terus tumbuh kemiskinan baru.

Kondisi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Jawa Timur. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dan Atas Harga Berlaku Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2007 - 2011*

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Pertumbuhan ekonomi
2007	536.981.881,91	288.404.321,28	6,11
2008	621.391.674,61	305.538.686,62	5,94
2009	686.847.557,72	320.861.168,91	5,01
2010	788.565.772,46	342.280.765,51	6,68
2011	884.143.574,81	366.984.301,20	7,22

Sumber : PDRB Jawa Timur Tahun 2012

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4**Persentase Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Jumlah Pria+Wanita (%)
1	2007	6.9
2	2008	7.0
3	2009	7.2
4	2010	7.2
5	2011	7.4

Sumber :Badan Pusat Statistik Jatim Tahun 2012

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Winardi, 2010). Di Jawa Timur tingkat pendidikan dapat diukur salahsatunya dengan besarnya rata-rata lama sekolah. Dan berdasarkan Tabel 1.4 rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 cenderung meningkat.

Tabel 1.5
Jumlah Pengangguran Terbuka Pria+Wanita di Jawa Timur Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Pria+Wanita (ribu jiwa)
1	2007	1,142,351
2	2008	955,106
3	2009	744,863
4	2010	657,692
5	2011	511,494

Sumber :Badan Pusat Statistik Jatim Tahun 2012

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu Negara khususnya orang yang sedang mencari kerja. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Di Jawa Timur besarnya tingkat pengangguran bergerak secara turun. Dan di tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 511,494 ribu jiwa, lihat Tabel 1.5.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Esmara dalam penelitian Tisna, (2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Siregar (2006) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun *magnitude* pengaruh tersebut relatif tidak besar. Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil. Sedangkan pendidikan mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengaruhnya paling besar. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memang merupakan pionir dalam pembangunan.

Oktaviani (2001) dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran. Selain itu Tisna (2008) dengan penelitian yang sama juga menghasilkan hasil yang sama pula, yaitu bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang mana penelitiannya menggunakan metode *panel data* tahun 2003 - 2004.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah “ Analisis Pengaruh (PDRB), Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2007-2011 “. Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kemiskinan yang ada di Jawa Timur hingga tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tergolong masih cukup tinggi yaitu mencapai 14,23 persen. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dilakukan dengan Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra) yang diharapkan mempengaruhi kemiskinan seperti produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran dapat meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama-sama.
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama-sama.
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama-sama.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama.

2. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama.
3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur secara bersama.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh jumlah penduduk, pdrb, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran- saran.